

**TINDAK PIDANA MAKAR TERHADAP KEUTUHAN WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL
87 KUHP (ANALISIS YURIDIS TERHADAP GERAKAN RIAU
MERDEKA TAHUN 1999)**

Oleh : Syefri Alpat Lukman

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat: Jl. HR.Soebrantas Nomor 92 Kec. Tampan Pekanbaru

Email : syefrialpat@yahoo.co.id – Telepon: 085271972009

Abstract

Attack is derived from the word 'aanslag' (Netherlands), which according to the literal meaning an attack or an assault. But the Criminal Code specially interpreted that the plot to commit an act already exists, if the will of the perpetrator is already visible in the form of the beginning of implementation (wan begin uit voering) in the sense contemplated by Article 53 of the Criminal Code (Article 87 of the Criminal Code). The criminal act of treason is a crime that is associated with security issues of the country and the safety of the country. The criminal acts of treason regulated in Book II, Chapter I of the Criminal Code on crimes violate the security of the country. Criminal assaults links with criminal offenses experiment. Where in if a criminal offense experiment has three elements: the intention and the beginning of implementation, and the implementation is not completed and not merely because his own. Thus, in the crime of treason has two important elements, namely: the intention and the beginning of implementation.

This research is a normative legal research or can be also called the doctrinal legal research. The result of research is, the Freedom Riau Movement who has violated the provisions of Article 106 of the Criminal Code so it's categorized as a criminal offense of treason for having fulfilled the elements of treason in the form of the element of intention and execution starters elements along with the purposes prohibited in the Criminal Code, and the addition must maintain professionalisme working of police, confronting the police to enforce the law is its ties with the provisions of the Criminal Procedure Code. Because in the Criminal Procedure Code starting that law enforcement conducted by the police when their achieved a reports, complaints, and caught red-handed making it difficult for the police in Riau for research the Freedom Riau Movement. Plus explicitly unclear setting duties and powers of inquiry and investigation in Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police so that the police are still referring to the Criminal Procedure Code to carry out their duties.

Keywords: Criminal attacks-State Unitary- Criminal Code- Freedom Riau Movement

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan hal tersebut merupakan hasil daripada upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari pihak-pihak yang sering merongrong kemerdekaan Indonesia. Sebagai negara kesatuan sudah barang tentu kemajemukan menjadi hal yang pasti akan dijumpai dalam dunia kemasyarakatannya. Hal itu dapat dilihat dari beragamnya suku bangsa dan sistem sosial yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut dibingkai dalam sebuah negara kesatuan.²

Setelah bangsa Indonesia secara patriotik, mengusir kaum penjajah secara bersama-sama dan berkelanjutan, masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah bertarung melawan dirinya sendiri. Menghadapi bangsa yang plural baik SDM dan SDA-

nya, dengan wilayah yang luas dan berbentuk negeri kepulauan (*Archipelago State*).³

Secara normatif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga ketertiban dan terutama keamanan di dalam masyarakat, karena dengan ketertiban dan keamanan yang terjamin kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan.⁴

Sebagai bangsa yang plural dengan wilayah yang luas ini tentunya akan membawa pengaruh yang besar bagi keutuhan wilayah Indonesia dari gangguan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melihat kedepan nantinya di khawatirkan bangsa Indonesia akan melawan dirinya sendiri yang menjelma kedalam bentuk pergerakan-pergerakan daerah yang tidak sejalan dengan negara khususnya untuk segi wilayah, maka untuk itu ditekankan secara keras dan jelas bahwa wilayah Indonesia itu tidak dapat dipisah-pisahkan, hal ini termuat dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 55.

²http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s_ppk_044009_chapture1.pdf , Diakses tanggal 18 Oktober 2015.

³Digdo Juniarto, Khairul Anwar, *Riau Dalam Tiga Opsi Otonomi, Federal, Atau Merdeka*, ISDP (Indonesian Society For Democracy And Peace), Pekanbaru, 2005, hlm. 91-92.

⁴Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, Ind-Hill, Co, Jakarta, 1993, hlm. 5.

Tahun 1945 yang berbunyi: “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Ditegaskan pula bahwa, hanya bentuk Negara Kesatuan saja yang tidak dapat dilakukan perubahan dalam pasal-pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tidak dilakukannya perubahan tersebut semakin memperkuat bentuk Negara Kesatuan sebagai bentuk final dan menghilangkan kekhawatiran sebagian masyarakat agar Indonesia tidak menjadi negara federal. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara yang memiliki satu kesatuan teritori (sesuai dengan UNCLOS 1982) dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai pulau Rote.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pada Buku Kedua Bab I, membahas mengenai kejahatan terhadap keamanan negara salah satunya adalah tindak pidana makar.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Mengenai istilah “makar” sendiri dimulai penafsiran secara autentik yang dapat ditemui dalam Pasal 87, yang berbunyi:

“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah

ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud di dalam Pasal 53”.

Dengan demikian dikatakan bahwa makar itu adalah suatu wujud tingkah laku tertentu yang telah memenuhi unsur pertama dan kedua dari pasal 53 (1), yang artinya untuk mempidana sesuatu pelaku/pembuat (*dader*) yang telah melakukan suatu perbuatan yang masuk kualifikasi kejahatan makar, sudahlah cukup terpenuhi syarat adanya niat yang ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan beserta maksud tertentu yang terlarang oleh Undang- Undang, tanpa harus dipenuhinya syarat tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.⁶

Dalam isitilah politik tindakan makar terhadap wilayah negara dikenal dengan istilah Separatisme yaitu usaha untuk memisahkan diri dari suatu negara atau negara bagian. Usaha separatisme bermaksud untuk mencapai otonomi atau pemisahan untuk berdiri sendiri atau menggabungkan diri dengan negara lain.⁷

Di Riau muncul *issue* agar Riau membentuk negara sendiri. Setidaknya belum lama

⁶Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 10.

⁷Erdianto Effendi, *Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan Dan Keutuhan wilayah Negara Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013, hlm. 9.

⁵<http://www.slideshare.net/khamdanwi/bahan-ajar-pilar-kebangsaan-pim-4>, Diakses tanggal 20 Oktober 2015.

hilang tentang Gerakan Riau Merdeka di tahun 1999 silam tokoh sentralnya adalah Tabrani Rab.

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 87 KUHP (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999) ”**.

B. Rumusan Masalah

- A. Apakah Gerakan Riau Merdeka termasuk dalam kategorisasi/unsur tindak pidana makar terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 87 KUHP?
- B. Mengapa aparat kepolisian tidak melakukan penegakan hukum terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Gerakan Riau Merdeka termasuk dalam kategorisasi/unsur tindak pidana makar atau bukan terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 87 KUHP.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya berpikir secara kritis dan tidak menganggap enteng mengenai kondisi yang rentan bagi terjadinya disintergrasi didalam tubuh negara seperti Gerakan Separatis yang keberadaanya dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Penelitian ini sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law enforcement*, *law application* (di Amerika), *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (dalam bahasa Belanda).⁸ Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakkan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 2, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

hukum).⁹ Penegakan hukum menurut Mertokusomo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.¹⁰

2. Tindak Pidana Makar

Tindak pidana makar merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan terhadap negara dan keselamatan negara. Tindak pidana makar diatur dalam Buku II Bab I KUHP tentang kejahatan melanggar keamanan negara.

Tindak pidana makar yang masuk dalam Bab I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

1. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kapala Negara atau Wakilnya (104);
2. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keutuhan Wilayah Negara (106);
3. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya Pemerintahan Negara (107).

3. Teori Pidanaaan

Pemidanaan disini dapat diartikan sebagai suatu proses

penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana.¹¹

Pemidanaan sebagai akibat lahir dari adanya suatu sebab musabab yaitu pelanggaran pidana. Musabab adalah tiap-tiap syarat yang tak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Ini dikenal dengan teori *conditio sine qua non* atau lebih dikenal dengan teori *equivalensi*.¹²

Adapun pemidanaan sebagai suatu nestapa akibat dari pelanggaran pidana pada dasarnya dibuat sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 129.

¹² Von Buri Dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2002, hlm. 92.

¹³ Van Bannelen dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 17.

⁹ Jimmly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm. 93.

¹⁰ R. M. Gatot. P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 65.

hukum kepustakaan.¹⁴ Di sini penulis menggunakan metode penelitian taraf sinkronisasi hukum yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal.

2. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, sumber data yang penulis digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder yaitu yang sudah dalam bentuk jadi yang disebut juga bahan hukum. Berdasarkan kekuatan mengikatnya maka bahan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Acara Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 23.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum ...*, Op. Cit., hlm. 52.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kajian pustaka, dimana penulis melakukan pengumpulan terhadap beberapa sumber data yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, makalah, surat kabar, dokumen, dan bahan-bahan hukum lain.

4. Analisis Data

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang

disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik, sehingga data dapat dimengerti. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gerakan Riau Merdeka Dalam Kategorisasi/Unsur Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Kejahatan terhadap keamanan negara merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan hukum negara. Dibentuknya kejahatan ini adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu dan merusak kepentingan hukum negara.¹⁶

Kejahatan terhadap keamanan negara secara sosiologis disebut Kejahatan politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani “politia” artinya “segala sesuatu yang berhubungan dengan negara atau segala tindakan, kebijaksanaan, siasat mengenai

pemerintahan suatu negara”¹⁷. Sebagaimana telah sama kita diketahui, KUHP secara garis besar membuat perbedaan atas semua jenis tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran. Buku II memuat segala jenis kejahatan dan Buku III segala jenis pelanggaran, didasarkan atas perbedaan antara *Rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*. Maksudnya, *Rechtsdelicten* adalah perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, meskipun belum terdapat dalam UU yang melarang dan mengancam dengan hukuman. Sedangkan *Wetsdelicten* adalah perbuatan-perbuatan dapat dihukum, karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan dalam UU sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman.

Penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tabrani Rab dan Gerakan Riau Merdeka-nya dapat dikategorikan kedalam *Wetsdelicten* karena perbuatan tersebut telah termuat di dalam KUHPidana dan selanjutnya dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan memiliki ancaman hukuman.

¹⁶<http://infoindonesianews.p/kejahatan-terhadap-keamanan-negara.html>, Diakses tanggal 20 Januari 2016.

¹⁷Bayu Dwiwiddy Jatmiko, tanpa Tahun. *Periodisasi Pengaturan kejahatan Keamanan Negara di Indonesia* dimuat dalam Jurnal Legality Universitas Muhammadiyah Malang, diakses dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/310> tanggal 19 Januari 2016.

2. Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia

Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa fase-fase yang pernah dialami Indonesia. Fase-fase tersebut memuat instrumen-instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan tindak pidana makar. Fase-fase tersebut, terdiri dari 4 (empat) fase yaitu fase pertama pada tahun 1866-1946, fase kedua pada tahun 1946-1963, fase ketiga Pada tahun 1963-1999, dan fase terakhir yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang.¹⁸ Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia, mengalami perkembangan di dalam perumusannya. Mulai dari fase pertama, sampai dengan fase terakhir. Fase-fase tersebut memuat keadaan sosial, hukum, dan politik yang mempengaruhi pengaturan tindak pidana makar.

Maka menurut penulis, keadaan-keadaan di masa lampau dapat menjadi koreksi penting di dalam pemerintah membuat suatu kebijakan yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan tertib hukum yang berlaku di Indonesia, karena menyangkut tentang penjaminan ketertiban dan keamanan negara serta demi terciptanya kepastian hukum ditengah masyarakat

3. Gerakan Riau Merdeka

Riau Merdeka pertama sekali diproklamirkan oleh Tabrani Rab pada 15 Maret 1999 tepatnya pada sabtu malam bertempat di Kampus Unri, jalan Patimura Pekanbaru. Dalam sebuah kontestasi politik di Riau, wacana merdeka ini berdampingan dengan wacana federalisme dan otonomi daerah. Pertarungan wacana tersebut berlangsung melalui berbagai polling, jajak pendapat, dan seterusnya. Namun, ketika “pertarungan” itu belum usai, Tabrani Rab dan para pengikutnya mendeklarasikan “Riau Berdaulat” sebagai *eufimisme* dari “Riau Merdeka”.

Dengan runtuhnya rezim Orde Baru dimanfaatkan oleh aktor-aktor Gerakan Riau Merdeka untuk menuntut bagi hasil minyak antara pusat dan daerah.

Sejak awal Gerakan Riau Merdeka, oleh para penggagasnya yakni Tabrani Rab dan Al azhar sebagai presiden pertama dan presiden kedua sudah menegaskan bahwa gerakan ini adalah sebuah gerakan damai (*peaceful freedom*). Namun terlepas daripada itu semua, digaris bawahi gerakan ini sudah pada tahap membuat semacam teks proklamasi yang diberi judul teks “ Deklarasi Riau Berdaulat “. Dan ini tentunya tidak boleh dianggap sepele begitu saja tentang keberadaan Gerakan Riau

¹⁸Abdurisfa Adzan
Trahjurendra, *Op.Cit*, hlm.8.

Merdeka ini karena dapat disinyalir telah mengandung unsur tindak pidana makar di dalamnya.

4. Analisa Tentang Gerakan Riau Merdeka Dalam Kategorisasi Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Makar berasal dari kata *aanslag* (Belanda), yang menurut arti harfiah adalah *penyerangan* atau *serangan*. Tetapi KUHP menafsirkan secara khusus yang mengatakan bahwa makar untuk melakukan suatu perbuatan sudah ada, apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan pelaksanaan (*begin wan uitvoering*) dalam arti yang dimaksud oleh Pasal 53 KUHP (Pasal 87 KUHP). Pasal 53 merupakan (mengenai) percobaan melakukan kejahatan yang dapat dilakukan (*strafbaar poging*) dan membatasi pembedaan pada suatu perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*), sehingga perbuatan yang baru merupakan perbuatan persiapan tidak dihukum.¹⁹

Dalam bukunya Djoko Praoso membagi bentuk delik terhadap keamanan negara sebagai berikut:²⁰

- a. *Hochverrat* (kejahatan terhadap keamanan di dalam negeri) yang meliputi, delik makar terhadap presiden

dan wakil presiden, makar tidak dapat diganggu gugatnya negara dan terhadap bentuk pemerintahan yang terdapat di dalam Bab I dan II Pasal 104-110 KUHP. Agar lebih mudah dipahami, bentuk kejahatan kepada keamanan di dalam negeri meliputi:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*)
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*)
3. Kepentingan hukum negara (*staat belangen*)
- b. *Landesverrat* (pelanggaran terhadap keamanan negara ke luar) yang masih dibedakan lagi menjadi dua jenis:
 1. *Diplomatische landesverrat* (yang dilakukan oleh diplomat)
 2. *Militerische landesverrat* (yang dilakukan oleh militer)

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 KUHP, maka makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Perbuatan makar disini tidak identik dengan atau tidak sama dengan kekerasan (*geweld*). Perbuatan dalam

¹⁹Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm..65.

²⁰Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 34.

makar yang oleh pasal 87 disebutkan sebagai permulaan pelaksanaan, adalah berupa segala macam bentuk perbuatan dengan maksud untuk sebagian atau seluruh wilayah RI jatuh ketangan musuh atau wilayahnya terpisah dengan wilayah kesatuan negara RI. Wujud perbuatan itu bisa bermacam-macam yang jika dilihat dari pasal 53 adalah berupa perbuatan pelaksanaan dalam rangka mencapai maksud tertentu.²¹

Gerakan Riau Merdeka tersebut telah dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Berikut akan dipaparkan mengenai unsur-unsur tindak pidana makar, yaitu:

1) Unsur Niat

Pengertian niat dalam bahasa Belanda bukanlah *intentie* atau *wil* tetapi *voornemen*. Memori KUHP Belanda (MvT) menjelaskan bahwa *voornemen* berarti *de (bewuste) richting van den will op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu).²²

2) Unsur Permulaan Pelaksanaan

Ajaran van Hamel tentang permulaan pelaksanaan : "*perbuatan apa yang dianggap sebagai pelaksanaan*

perbuatan yaitu apabila dari perbuatan itulah terbukti kehendak yang kuat dari si pelaku untuk melaksanakan perbuatannya."²³

Dengan terpenuhinya syarat untuk dipidananya tindak pidana makar yang mana adalah adanya niat yang telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dalam arti yang dimaksud oleh pasal 53 (1) dan dalam mewujudkan permulaan pelaksanaan tersebut telah didorong oleh suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) yang terlarang pada pasal 106 KUHP maka Gerakan separatisme Riau Merdeka dapat dipidana .

B. Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Dalam Negara Hukum Republik Indonesia Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999.

Penegakan hukum terhadap Gerakan Riau Merdeka sebenarnya telah dilakukan sejak awal gerakan ini muncul, pada saat kepolisian masih tergabung di dalam ABRI. namun militer sedikit agak gamang menyikapi Gerakan Riau Merdeka tersebut, hal ini dikarenakan peran militer pada Orde Baru membuat posisi militer kurang menguntungkan sehingga dalam menyikapi Gerakan Riau Merdeka cenderung hati-hati. Selain itu selama ini institusi militer tidak

²¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 19.

²²http://www.kompasiana.com/hendra_budiman/teoriniat_54fd1f85a33311431d50f866, Diakses tanggal 20 Januari 2016.

²³Widnyana, *Hukum Pidana II*, Yayasan Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1992, hlm. 5.

biasa menggunakan pendekatan persuasif dalam menyikapi gerakan yang menentang kekuasaan.²⁴

Pelaksanaan tugas aparat kepolisian harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan aturan hukum kepadanya. Walaupun secara normatif GRM telah dikategorikan sebagai kejahatan makar berdasarkan ketentuan KUHPidana namun secara implementatif kepolisian juga tidak dapat berbuat banyak terkait dengan profesionalisme penegakan hukum yang tidak diatur secara jelas dalam KUHP dan Undang-Undang Kepolisian yang mengakibatkan kepolisian gamang menilai ada atau tidaknya indikasi keadaan bahaya yang ditimbulkan dari gerakan tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh AKBP Sudaryono selaku Kasubdit I Direskrim Polda Riau bahwa saat ini pihaknya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengatur fungsi kerja aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Kepolisian.

Sama halnya dalam menanggapi Gerakan Riau Merdeka, pihak kepolisian tidak dapat melakukan tindakan lebih lanjut apabila tidak adanya

laporan ataupun pengaduan dari masyarakat ataupun pihak lainnya terkait gerakan separatis tersebut terkecuali dalam hal apabila tertangkap tangan maka aparat kepolisian dapat melakukan penegakan hukum disitu.²⁵

Disamping fakta dan alasan tersebut, Menurut AKBP Sudaryono, tidak dilakukannya proses penindaklanjutan terhadap Gerakan Riau Merdeka, Pertama, karena aparat kepolisian melihat tidak adanya pergerakan yang mengindikasikan bentuk keadaan bahaya di dalam Gerakan Riau Merdeka itu sendiri. Dalam kapasitasnya sama seperti gerakan kampus lainnya, belum terlihat secara eksplisit dari perbuatan makar yang dimaksud dari KUHPidana. Kedua, pergerakan dianggap belum nyata artian tidak mengandung ancaman serta tindakan yang masih wajar dalam kapasitas kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum membuat Gerakan Riau Merdeka dibiarkan mengemuka ke permukaan namun tetap dalam pengawasan aparat kepolisian.

Penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap kejahatan khususnya mengenai tindak pidana makar penting untuk ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukumnya tidak boleh dianggap sepele begitu saja supaya gerakan

²⁴http://www.slideshare.net/bahana_ur/riau-merdeka-12018669, Diakses tanggal 30 Januari 2016.

²⁵Wawancara dengan AKBP Sudaryono, Kasubdit I Direskrim Polda Riau, Pada tanggal 11 Februari 2016.

separatis tidak meluas. Walaupun indikasi separatisme ini belum begitu mencuat, perlu kiranya aparat kepolisian melakukan langkah antisipasi agar tidak terulang hal demikian dikemudian harinya. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat hukum kepolisian dituntut agar dapat mengungkap suatu kasus tindak pidana yang memang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara rasional dan mampu mengambil keputusan dengan tepat sesuai misi penegak hukum.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana makar (*aanslag*) merupakan bentuk kejahatan terhadap keamanan negara yang menyerang kepentingan hukum negara. Bahwa makar untuk melakukan suatu perbuatan sudah ada, apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan pelaksanaan (*begin wan uit voering*) yang dimaksud oleh Pasal 53 KUHP (Pasal 87 KUHP) beserta dengan maksud yang terlarang di dalam KUHP. Gerakan Riau Merdeka adalah gerakan separatisme yang melanggar ketentuan pasal 106 KUHP tentang

keamanan wilayah karenanya dikategorikan sebagai tindak pidana makar yang telah memenuhi unsur-unsur makar berupa unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan beserta dengan maksud terlarang di dalam KUHP.

2. Menyikapi penegakan hukum terhadap Gerakan Riau Merdeka secara implementatif kepolisian menilai bahwa belum adanya indikasi keadaan bahaya yang ditimbulkan dari gerakan tersebut walaupun secara normatif GRM telah dikategorikan sebagai kejahatan makar hal ini berdasarkan ketentuan KUHPidana. Disamping harus menjaga profesionalisme kerja kepolisian, yang dihadapi aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum adalah keterikatannya dengan ketentuan KUHP sehingga hal ini menyulitkan kepolisian dalam menganggapi Gerakan Riau Merdeka.

B. Saran

1. Bagi perkembangan Rancangan KUHPidana kedepan harus ada suatu pengkajian secara komprehensif atas perwujudan secara konkrit terhadap ukuran apa yang dikatakan sebagai tindak pidana makar dan sejauh mana perbuatan tersebut dipandang sebagai tindak pidana makar, karena di

dalam KUHPidana yang sekarang tidak dijabarkan secara jelas mengenai perbuatan makar itu sendiri yang cenderung justru lebih bersifat kepada pasal karet. Jika perlu harus ada pengaturan hukum tersendiri diluar KUHPidana khusus mengenai perbuatan makar karena ini berkaitan langsung dengan kepentingan negara khususnya terhadap keutuhan wilayah NKRI.

2. Tindak pidana makar ini pada dasarnya adalah konflik vertikal yang terjadi antara rakyat dan pihak penguasa negara, maka demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak penguasa, dapat disarankan agar pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, *good governance*, melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah, serta menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan dan persatuan melalui pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, dan rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan tanpa adanya pandangan/ideologi yang berbeda.
3. Penegakan hukum berdasarkan KUHP Maupun Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus selalu menjunjung tinggi supremasi moral, karena penegakan hukum yang diskriminatif dan tanpa pengetahuan yang baik akan menjauhkan dari tujuan penegakan hukum itu sendiri yaitu kebenaran dan keadilan.

4. Peningkatan profesionalisme dari aparat penegak hukum khususnya penyidik polri, berupa peningkatan pemahaman terhadap teori-teori hukum pidana, sebab semua putusan penegak hukum harus bisa menjadi *legal education* bagi masyarakat dan *law reform* bagi undang-undang yang tidak jelas. Serta peningkatan dan pemahaman aparat kepolisian serta tindakan yang harus selalu responsif terhadap setiap perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat terutama dalam menghadapi perkembangan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan

- Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Konstitusi RI, Jakarta.
- , 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung
- Chazawi, Adami, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Juniarto Digdo dan Khairul Anwar, 2005. *Riau Dalam Tiga Opsi Otonomi, Federal, Atau Merdeka*, ISDP (Indonesian Society For Democracy And Peace), Pekanbaru.
- Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang, 2010. *Hukum Pidana Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loqman, Loebby, 1993. *Delik Politik Di Indonesia*, Ind-Hill, Co, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1985. *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 2, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widnyana, 1992. *Hukum Pidana II*, Yayasan Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- B.Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 periode pertama (18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949) bersama dengan penjelasan resmi dimuat dalam Berita Republik Indonesia (BRI) Tahun II (Tahun 1946) No.7. Kedua, UUD RIS 1949 dengan Keppres No.48 Tahun 1950 Tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indoneia Serikat dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1950 No.3. Ketiga, UUDS 1950 dengan UU Federal No.7 Tahun 1950 dimuat dalam Lembaran Negara RIS Tahun 1950 No.56 dan Penjelasan Tambahan Lembaran Negara RIS No.37. Keempat, UUD 1945 periode kedua (5 Juli 1959 s/d amandemen) dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan Keppres No.150 Tahun 1959 dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No.75 meliputi Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya

bersama-sama dengan
Dekrit Presiden 5 Juli
1959

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Pidana Lembaran Negara
Nomor 127 Tahun 1958,
Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Acara
Hukum Pidana Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 8
Tahun 1981, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3209.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 43
Tahun 2008 Tentang
Wilayah Negara
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4925.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian
Negara Republik
Indonesia Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 2
Tahun 2002, Tambahan
Lembaran Negara Nomor
4168.

C. Disertasi, Jurnal

Erdianto Effendi, *Tindak Pidana
Makar Terhadap
Keamanan Dan
Keutuhan wilayah Negara
Dihubungkan Dengan
Perlindungan Hak Asasi
Manusia Pelaku,*

Bandung : Disertasi
Universitas Padjadjaran,
2013.

Abdurisfa Adzan Trahjurendra,
"Politik Hukum
Pengaturan Tindak Pidana
Makar di Indonesia."
dalam *Jurnal Mahasiswa
Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya* ,
Malang : Edisi 1.2, Mei
2014.

Bayu Dwiwiddy Jatmiko,
"Periodisasi Pengaturan
kejahatan Kemanan
Negara di Indonesia"
dalam *Jurnal Legality
Universitas
Muhammadiyah, Malang :*
Tanpa Tahun.

D. Website

http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s_ppk_044009_chapter1.pdf , Diakses tanggal
18 Oktober 2015.

<http://www.slideshare.net/khamdanni/bahan-ajar-pilar-kebangsaan-pim-4>,
Diakses tanggal 20
Oktober 2015.

<http://infoindonesianews.p/kejahatan-terhadap-keamanan-negara.html>, Diakses
tanggal 20 Januari 2016.

http://www.slideshare.net/bahana_ur/riau-merdeka-12018669, Diakses tanggal
30 Januari 2016.